

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan bagi masyarakat negara maju merupakan sesuatu yang tidak asing lagi. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak jauh dari dunia perbankan. Perbankan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh negara maju. Tidak hanya negara maju, negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dengan adanya perbankan. Perbankan adalah lembaga keuangan yang cukup berperan aktif terhadap ekonomi dunia, dan juga perkembangan perekonomian suatu negara.

Pada zaman modern ini, bank mempunyai peran yang besar ketika mendorong pertumbuhan ekonomi Negara. Tidak sedikit sektor usaha yang terdiri dari industry, perdagangan dan lain-lain butuh adanya perbankan. Semua sektor tersebut tidak dapat terlepas dari perbankan. Peran bank bagi masyarakat individu, maupun masyarakat bisnis sangat penting bahkan bagi suatu negara, karena bank sebagai suatu lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh dalam perekonomian suatu negara. Hal ini pun sudah menjadi tidak asing lagi bagi masyarakat umum bahwa perbankan sangat berperan aktif. Dari peran aktif tersebut, kehidupan perekonomian di suatu negara akan menjadi berkembang ketika semua masyarakat sadar akan pentingnya dunia perbankan ini (Ismail,2010:2).

Dengan adanya kesadaran masyarakat tentang dunia perbankan, membuat aset perbankan di Indonesia menjadi meningkat. Adanya kesadaran dari masyarakat,

perbankan mengalami peningkatan nasabah yang membuat aset perbankan bertambah. Berikut data aset perbankan di Indonesia:

Tabel 1.1 Perkembangan Aset Bank Umum Berdasarkan Kelompok Bank 2012-2016

Kelompok Bank	2012	2013	2014	2015	2016
- Bank Persero	1.535.343	1.758.873	2.076.605	2.313.316	2.666.516
- BUSN Devisa	1.705.408	1.962.539	2.200.142	2.363.516	2.672.238
- BUSN Non Devisa	135.472	162.457	186.817	193.149	73.684
- BPD	366.685	389.964	440.691	475.696	529.746
- Bank Campuran	217.713	290.219	278.312	313.570	319.328
- Bank Asing	301.966	390.415	432.582	473.336	468.286
Total	4.262.587	4.954.467	5.615.150	6.132.583	6.729.799

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol. 15, No. 9, Agustus 2017

Perbankan di Indonesia dibagi atas perusahaan Bank Persero/BUMN (Bank Umum Milik Negara), BUSN Devisa (Bank Umum Swasta Nasional), BUSN Non Devisa, BPD (Bank Pembangunan Daerah), Asing, dan Bank Campuran. Dari daftar tersebut, bank yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia adalah Bank BUMN. Bank BUMN dipercayai karena bank tersebut bisa dikatakan bank milik pemerintah dengan kebanyak aset dimiliki oleh pemerintah. Negara Indonesia adalah negara republik yang menjadikan negara tersebut tidak jauh dari sistem

pemerintahan. Di dalam Bank BUMN juga ada pembagian Bank lagi yaitu Bank BUMN Konvensional dan Bank BUMN Syariah. Bank konvensional adalah sebuah bank yang beraktifitas dalam hal perekonomian konvensional dengan menawarkan jasa untuk arus pembayaran. Sedangkan bank syariah adalah sebuah bank yang beraktifitas dalam hal perekonomian syariah dengan menawarkan jasa untuk arus pembayaran.

Dari tabel 1.1, kita dapat mengatakan bahwa bank yang mendominasi adalah bank devisa, namun bank devisa mempunyai ratusan bank. Sedangkan Bank BUMN hanya memiliki beberapa bank, diantaranya bank umum dan unit usaha. Dengan penduduk Indonesia yang mencapai ratusan ribu jiwa sebenarnya mungkin mencukupi untuk menangani masalah perekonomian, hanya saja bagaimana masyarakat dan negara menindak lanjuti permasalahan yang ada.

Meskipun sama-sama Bank BUMN, dari jenis-jenis perbankan tersebut yang ada di Indonesia dengan masyarakat yang mempunyai beragam kepercayaan, ini membuat tantangan tersendiri bagi bank konvensional dan bank syariah. Hal ini ditegaskan dengan bukti total aset di bank konvensional dan bank syariah. Berikut adalah data aset perbankan di Indonesia:

Tabel 1.2 Perkembangan Aset Perbankan berdasarkan Kegiatan Usaha di Indonesia 2014-2017(Agustus)

Kelompok Bank	2014	2015	2016	2017 (Agustus)
- Buku 1	166.367	131.016	100.103	67.386
- Buku 2	1.003.337	810.899	844.755	819.170
- Buku 3	2.762.817	2.245.451	2410.757	2.384.832
- Buku 4	2.477.667	2.728.358	3120.003	3.489.514
- Buku 1 Syariah	35.163	23.592	15.968	15.851
- Buku 2 Syariah	169.797	119.031	159.374	170.294
- Buku 3 Syariah	-	70.799	78.839	81.797
Total	5.615.150	6.129.146	6.729.799	7.028.846

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 15, No. 8, Juli 2017

Menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 6 /pojk.03/2016 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, bank umum sudah harus dikelompokkan juga sesuai dengan kegiatan usahanya berdasarkan modal inti yang dimiliki atau yang sudah dikenal dengan BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha). Kegiatan usaha ditetapkan pada UU No. 10 tahun 1998 tentang kegiatan usaha bank umum dan bank syariah diatur pada UU No. 21 tahun 2008.

Dari data yang telah dipaparkan pada Tabel 1.2, dapat di jelaskan bahwa Bank Konvensional memiliki aset yang lebih banyak dibandingkan aset Bank Syariah. Contohnya Buku 1 konvensional dan Buku 1 Syariah yakni pada buku bank konvensional sebesar 67.386 Miliar, sedangkan untuk buku 1 syariah 15.851 Miliar. Itu semua bisa dimaklumi dengan jumlah bank konvensional lebih banyak

dibandingkan jumlah bank syariah. Dengan adanya perkembangan aset yang lebih besar di bank konvensional dibandingkan bank syariah, memungkinkan ada hambatan *intern* maupun *ekstern* yang kemudian akan berpengaruh pada kinerja perusahaan dan dapat mengakibatkan perusahaan perbankan tersebut dinilai kurang sehat. Meskipun mengalami peningkatan dalam lingkup bank syariah tetapi keadaan tersebut tidak sebanyak peningkatan aset di bank konvensional.

Aspek-aspek yang terdapat pada aset perbankan tidak terlepas dari rasio-rasio keuangan. Karena dengan adanya rasio keuangan, aset tersebut akan dihitung mengalami penurunan atau kenaikan. Berikut rasio-rasio kinerja keuangan perbankan di Indonesia:

Tabel 1.3 Rasio Keuangan Bank Umum Konvensional 2012-2017

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal Minimum (%)	17,43	18,13	19,57	21,39	22,93
- Modal	496.629	626.888	754.174	914.657	1.052.597
- ATMR	2.849.997	3.458.404	3.854.234	4.276.555	4.589.611
Rasio Modal Inti terhadap ATMR (%)	15,60	16,36	18,01	19,00	21,19
- Modal Inti (Tier I)	444.545	565.774	694.198	812.590	972.350
- ATMR	2.849.997	3.458.404	3.854.234	4.276.555	4.589.611
ROA (%)	3,11	3,08	2,85	2,32	2,23
- Laba sebelum pajak	117.103	134.571	142.769	132.601	136.048
- Rata-rata total aset	3.761.912	4.365.364	5.004.089	5.703.813	6.106.959
BOPO (%)	74,10	74,08	76,29	81,49	82,22
- Biaya Operasional	321.357	368.460	446.217	569.141	624.173
- Pendapatan Operasional	433.678	497.384	584.887	698.404	759.146
NIM (%)	5,49	4,89	4,23	5,39	5,63
- Pendapatan bunga bersih	200.338	233.841	260.940	293.824	329.913
- Rata-rata total aset produktif	3.648.741	4.782.557	6.161.761	5.449.642	5.854.786
LDR (%)	83,58	89,70	89,42	92,11	90,70
- Total Kredit kepada pihak ketiga bukan Bank	2.597.026	3.158.099	3.526.364	3.903.936	4.199.713
- Total Dana Pihak Ketiga	3.107.385	3.520.616	3.943.697	4.238.349	4.630.352
Rasio Aset Likuid (%)	18,45	15,77	16,24	16,70	17,50
- Aset Likuid Primer	616.043	589.158	686.023	736.720	837.433
- Aset Likuid Sekunder	142.989	163.506	192.598	251.623	296.098
- Total Aset	4.115.003	4.773.892	5.410.098	5.919.390	6.475.602

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 15, No. 9, Agustus 2017

Tabel 1.4 Rasio keuangan Bank Umum Syariah 2014-2017 (Agustus)
Berdasarkan BUKU 1.

Indikator	2014	2015	2016	2017 (Agustus)
CAR(%)	17,56	20.49	17.64	16.67
-Modal	3.512	3.851	1.765	1.709
-ATMR	19.996	18.800	10.002	10.251
Kualitas Aktiva Produktif APYD terhadap aktiva produktif (%)	3.49	4.26	5.83	8.64
-APYD	857	975	991	1.447
-Total Aktiva Produktif	24.591	22.852	17.009	16.739
Rentabilitas Net Operating Margin (%)	0.75	0.42	(4.00)	(1.35)
-Pendapatan	168	81	(508)	(196)
-Rata-rata Aktiva	22.525	19.467	12.680	14.517
ROA (%)	0.66	0.40	(3.51)	(1.26)
-Laba	165	86	(502)	(196)
-Rata-rata total Aset	25.126	21.575	14.301	15.558
BOPO (%)	95.36	97.66	118.17	111.50
-Biaya Operasional	3.459	3.373	3.302	1.269
-Pendapatan	3.627	3.454	2.794	1.139
Likuiditas Short Term Mismatch	18.03	20.21	23.18	27.90
-Aktiva Jangka Pendek	3.910	3.820	3.001	3.632
-Kewajiban Jangka	21.684	18.906	12.951	13.018
FDR (%)	93.38	96.60	94.18	90.09
-Pembiayaan	19.257	17.495	11.396	11.676
-Dana Pihak Ketiga	20.623	18.112	12.101	12.961

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 15, No. 9, Agustus 2017

Dari data pada tabel 1.3 dan tabel 1.4, rasio kinerja bank umum konvensional dengan kinerja bank umum syariah sama-sama mempunyai kinerja yang baik. Tetapi kesimpulan yang dapat diambil masih ada perbedaan dari setiap rasio-rasio keuangan pada kinerja bank konvensional dan kinerja bank syariah. Ada yang memiliki kinerja yang baik pada rasio ini, ada juga yang tidak baik. Seperti halnya

rasio NIM pada BUK memiliki nilai yang cenderung stabil, meskipun ada penurunan tetapi kembali meningkat pada agustus 2017. Sedangkan rasio NOM pada BUS mengalami penurunan nilai bahkan hingga negatif pada periode tahun 2016 dan mulai meningkat pada tahun 2017. Ini menandakan NIM/NOM pada BUK lebih baik daripada BUS, karena jika nilai NIM/NOM semakin tinggi, tandanya perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Sama halnya rasio ROA, rasio ROA pada BUK memiliki nilai cenderung menurun tetapi ini masih dalam nilai yang positif dan pada BUS memiliki yang cenderung menurun juga hingga negatif yakni pada tahun 2016 dan agustus 2017. Ini menyatakan bahwa nilai ROA pada BUK lebih baik karena nilainya masih cenderung positif tidak ada yang negatif. Dengan adanya hal ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja BUK lebih baik di bandingkan dengan BUS khususnya BUKU 1. Ini bisa disebabkan karena kurang baiknya perusahaan BUS dalam menerapkan sistem yang baik pada kinerja perusahaan.

Dewasa ini, mengukur baik atau tidak baiknya suatu bank dapat diukur dengan melihat tingkat kesehatan bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan peraturan Perbankan Syariah diatur pada POJK No. 8/POJK.03/2014 pasal 1 yang berisi tentang tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank. Tingkat kesehatan bank dinilai melalui metode RGEC.

RGEC kepanjangan dari *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*. *Risk profile* adalah sebuah penilaian tentang risiko bank yang sering terjadi, atau sudah biasa diramalkan bagi setiap bank. Di dunia perbankan, *risk profile* ada 8 aspek yakni risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategi, kepatuhan, dan reputasi. 8 Bagian itu masih dipisah menjadi 2 bagian aspek risiko, yaitu aspek tingkat risiko *inherent* dan kualitas penerapan manajemen risiko. GCG atau *Good Corporate Governance* adalah sebuah tata kelola perusahaan yang diterapkan agar perusahaan tersebut mempunyai pegangan bagaimana cara mengatur atau mengelola sebuah perusahaan yang baik dan benar. *Earnings* adalah sebuah aktivitas pekerjaan bank yang berpedoman pada nilai laba perusahaan atau biasa disebut dengan penilaian dari aspek rentabilitas bank itu sendiri. Dalam dunia perbankan, *earnings* dapat dilihat dari ROA (*Return On Assets*), NIM (*Net Interest Margin*), dan komponen-komponen laba lainnya. *Capital* adalah sebuah pemodalan yang dimana dapat digunakan ketika mengalami risiko adanya kerugian.

Sebuah hambatan kinerja perusahaan biasanya dapat dilihat pada tata kelola perusahaan / *Good Corporate Governance*. Achmad Daniri berpendapat bahwa GCG juga merupakan bagian yang paling ekonomis dalam memelihara lamanya usaha dari segi profitabilitasnya juga pertumbuhannya (Nuswandari, 2009:74). *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai

bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar (Nogi, 2003:12).

Kegencaran tentang adanya penerapan GCG di dunia perbankan sebenarnya sudah terasa sejak adanya kejadian memburuknya perekonomian di negara Indonesia karena belum ada peraturan tentang *good corporate governance* di perusahaan khususnya di dunia perbankan. Booz-Allen & Hamilton berpendapat bahwa ketika tahun 1998 memperlihatkan bahwa aspek GCG di Indonesia merupakan yang paling buruk di regional Asia Timur, nilainya sebesar (2,88) sedangkan untuk negara tetangga kita yakni Malaysia sebesar (7,72), untuk negara Thailand (4,89), Singapura (8,93), dan negara maju Jepang (9,17). Adanya kelemahan GCG pun masih ditambah buruknya sistem hukum serta peradilan. Ada juga studi yang sama pembahasannya, yakni aspek efisiensi di Indonesia hanya mempunyai nilai sebesar (2,5) dibandingkan dengan negara Malaysia pun sangat jauh yang nilainya sebesar (9,00), Thailand mempunyai nilai (3,25), dan negara maju seperti Singapura (10,00) serta Jepang (10,00). (Sutedi,2011:68)

Maka dengan adanya permasalahan-permasalahan ini, perekonomian Indonesia khususnya dibidang perbankan menerapkan peraturan GCG. Peraturan pelaksanaan penilaian GCG di atur pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Hal-hal tersebut berharap menjadi perbankan untuk sektor yang mengutamakan prinsip kehati-hatian yang bertumbuh (Sutedi,2011:94). Sedangkan

untuk bank syariah yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (PBI, Lembaran Negara RI No. 175 Th. 2009). Dengan adanya hal ini, BUK/BUS harus bisa menerapkan semua kegiatan dengan efektif dan efisien dalam menerapkan GCG.

Di dalam dunia BUK dan BUS sebenarnya sudah banyak yang menerapkan publikasi laporan GCG terhitung sejak adanya peraturan. Dengan adanya hal tersebut, seharusnya menjadi lebih mudah dalam melakukan tata kelola untuk menjadi lebih baik. Meskipun sudah diterapkan peraturan tersebut untuk membuat laporan GCG, masih ada BUK/BUS yang perkembangan asetnya belum signifikan meskipun tetap mengalami kenaikan aset. Padahal dengan adanya transparansi, akan memudahkan nasabah untuk menilai baik buruknya BUK/BUS dan akan menjadi masukan bagi perusahaan tersebut agar kemudian hari menjadi diperbaiki. Pada akhirnya hal-hal yang bersangkutan seperti perkembangan aset akan mengalami peningkatan jika perusahaan tersebut dapat mengelola perusahaan dengan lebih baik melalui masukan-masukan dari nasabah atau orang-orang yang berhubungan dengan bank yang telah memberikan kritik dan saran. Dengan keadaan seperti ini, BUK/BUS jangan mengesampingkan peran pembuatan laporan GCG.

Contohnya dari permasalahan menyampingkan pembuatan laporan GCG yaitu tentang penyipuan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) global, Diebold Inc, dengan beberapa bank BUMN yang ada di Indonesia membuat fokus pemberitaan penting dari beberapa golongan. Permasalahan yang

telah dipaparkan di atas membuat sebuah pelanggaran dari adanya penerapan GCG di bank BUMN, Diebold Inc sudah mengakui adanya penyuaipan pada kasus ini ke pihak yang berwajib di Amerika Serikat. Pengakuan dari Diebold Inc yakni perusahaan itu menggelontorkan uang sebesar USD147 ribu bagi pejabat di tiga bank BUMN yang ada di Indonesia untuk berlibur. Tujuan dari kegiatan tersebut bagi perusahaan Diebold Inc untuk melancarkan aktivitas-aktivitas bisnisnya. Atas perintah dari Gubernur BI, Bank yang termasuk milik BUMN diharapkan agar setiap adanya kegiatan untuk dilaporkan terlebih dahulu terhadap bidang pengawasan agar kejadian sebelumnya yang berdampak negatif tidak terjadi lagi. Dengan adanya kasus ini, Bank Indonesia menegaskan akan melakukan tinjauan ulang tentang penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) atau tata kelola perusahaan yang baik di lingkup bank BUMN. Jika bank-bank BUMN tersebut ada bukti nyata tentang pelanggaran *Good Corporate Governance* tersebut, Bank Indonesia akan melakukan tindakan berupa sanksi tegas (Sindonews.com, 2013).

Sedangkan contoh permasalahan pada bank BUMN syariah yakni tentang rencana merger bagi bank syariah. Meskipun rencana ini masih simpang siur dan masih belum terlaksana, OJK dan pemerintah sudah sempat merundingkan permasalahan ini meskipun sampai sekarang belum ada titik temunya. Perencanaan merger antar bank syariah tersebut menemukan beberapa catatan yang dilakukan OJK, selayaknya SDA/Sumber Daya Alam di bank BUMN syariah, ketika bibit dan bobot masing-masing bank tidak sama rata, itu akan mempersulit ketika terjadi

merger. Seperti yang dikatakan oleh Yap, komponen-komponen setiap bank mempunyai perbedaan-perbedaan tersendiri. Contohnya pada BNI Syariah dilihat dari total aset mempunyai posisi keempat, tetapi dari segi profitabilitasnya tahun 2014 pada posisi pertama. Dengan adanya perencanaan ini, apakah ada permasalahan pengelola perbankan sampai terjadinya merger. Karena ketika adanya merger menggambarkan perusahaan-perusahaan tersebut ingin lebih bertahan dari mana mestinya (bisnis.tempo.co, juni 2015).

Menurut penulisan dari Safyra Primadhyta wartawan CNN Indonesia menjelaskan bahwa alasan terjadinya merger karena disamping aset bank syariah masih di bawah 10%, menjadikan bank BUMN syariah harus di bantu dengan cara merger. Merger berguna untuk menaikkan modal bank BUMN syariah agar dapat menjadi golongan pada bank umum kegiatan usaha atau BUKU III, dimana bank yang mempunyai modal inti minimal senilai Rp. 5 triliun. Ini mengakibatkan kinerja bank BUMN syariah menjadi lebih efektif karena tertunjang dengan modal yang banyak (CNNIndonesia.com, mei 2017).

Adapun menurut penulisan dari Claessens berpendapat bahwa ketika terdapat penerapan GCG dapat memperkecil *Cost of capital*, memperbesar nilai ROE, efisien serta semua *stakeholders* diperlakukan sama, walaupun ikatannya belum terlihat jelas (Claessens, 2006). Seperti penelitian yang di tulis oleh Luh Wulan Permatasari dan Gayatri (2016) bahwa rasio profitabilitas dapat memoderasi pengaruh GCG pada nilai perusahaan. Jadi ketika nilai GCG bertambah tinggi, nilai perusahaan pun

akan tinggi, dengan pokok utamanya untuk perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi juga. Adanya profitabilitas dapat memperkuat pengaruh baik atau positif antara nilai perusahaan dengan GCG.

Maka dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin meneliti tentang *Good Corporate Governance* di Bank BUMN Konvensional dan Bank BUMN Syariah dengan cara membandingkan adanya pengaruh dari variabel independen yaitu kinerja keuangan dilihat dari rasio profitabilitas terhadap penerapan GCG sebelum dan sesudah ditetapkan peraturan tentang penerapan tata kelola yang baik bagi BUK dan BUS.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sebelumnya sudah dijelaskan , dapat kita ambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan rasio profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan GCG pada Bank BUMN Konvensional dan Bank BUMN Syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat peningkatan rasio profitabilitas sesudah penerapan GCG pada Bank BUMN Konvensional dan Bank BUMN Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dipikirkan , dapat kita ambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui perbedaan rasio profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan GCG pada Bank BUMN Konvensional dan Bank BUMN Syariah.
2. Mengetahui peningkatan rasio profitabilitas sesudah penerapan GCG pada Bank BUMN Konvensional dan Bank BUMN Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadikan ilmu tambahan bagi penulis agar lebih memahami mendalam tentang penelitian penerapan *Good Corporate Governance*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bukti perihal *Good Corporate Governance* yang bisa mempengaruhi baik buruknya nilai laporan keuangan, menjadikan ilmu dari yang peneliti teliti dapat menjadi wawasan baru bagi dunia akademisi.

3. Bagi Bank

Jika kualitas GCG di dalam suatu bank mempunyai nilai yang baik ini akan memberikan manfaat seperti menambah kinerja dalam perbankan, menambah keefektifitasan waktu dalam bekerja, dan juga dapat menambah pelayanan bagi nasabah, pemilik saham, masyarakat umum, dan pihak-pihak yang bersangkutan.